SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Sensus Aset Dimulai Tahun Ini
Entitas / Cakupan : Kota Bandung
Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.3
Edisi : Rabu, 6 Juni 2018

Sensus Aset Dimulai Tahun Ini

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah Kota Bandung bakal menyelenggarakan sensus aset tetap pada tahun anggaran 2018 ini. Program ini diharapkan menjadi langkah maju berikutnya dalam mengejar target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandung Dadang Supriatna menyatakan, sensus tetap akan dilakukan untuk seluruh aset yang tercatat, mulai dari komputer hingga bidang tanah. Proyek sensus ini akan segera diunggah dalam laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung.

"Ini merupakan langkah lanjutan kita menertibkan aset. Sudah ada perubahan signifikan dalam beberapa

tahun terakhir," tutur Dadang, yang juga menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung, Selasa (5/6/2018) siang, di Balai Kota Bandung.

Pemkot, kata Dadang, telah melakukan perbaikan signifikan dalam pengelolaan aset. Jika pada 2015, nilai aset yang masih bermasalah atau dicekualikan oleh BPK mencapai Rp 11,1 triliun, pada tahun 2017 nilainya menyusut hingga Rp 1,1 triliun.

Dadang menyakini, pemkot telah melakukan penertiban pengelolaan aset di jalur yang tepat. Namun, karena jumlah yang begitu besar, butuh waktu lebih untuk menuntaskannya. "Penyakitnya sudah kita ketahui, obatnya sudah pas. Tapi karena *item* (permasalahan) banyak, perlu waktu lebih. Tidak bisa kilat. Sensus aset ini adalah salah satu langkah strategis kami," ucapnya.

Terhadap masalah pelanggaran hukum dalam piutang sewa, Dadang menegaskan pentingnya kajian mendalam

untuk mengambil tindakan. Salah satu permasalahan umum yang ditemui di lapangan adalah banyaknya penyewa yang membangun rumah di lahan aset pemkot. "Nah, status bangunan itu bagaimana? Milik siapa, bagaimana menaksir nilainya. Ini yang harus dipilah-pilah dengan teliti," katanya.

Sebelumnya Pnejabat Wali Kota Bandung Muhamad Solihin juga menekankan langkah yang diambil Pemkot dalam penertiban pengelolaan aset sudah tepat. Ia optimistis, jika seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot bisa mempertahankan ritme kerja, dan pemkot Bandung tahun 2019 mendatang bakal memperoleh opini WTP untuk pertama kalinya.

Selain meminta para ASN tidak patah semangat memperjuangkan target WTP, Solihin juga menegaskan pentingnya ketegasan penindakan hukum untuk setiap pelanggaran. Ia berharap tindakan tegas dilakukan dalam koridor hukum yang sesuai.

Aset besar

Dalam permasalahan piutang sewa yang dihadapi Pemkot Bandung selama bertahun-tahun, terdapat beberapa aset besar dan strategis yang terlibat. Salah satunya adalah lahan Kebun Binatang Bandung seluas sekitar 13,5 hektare di kawasan Tamansari.

Pernah membayar sewa beberapa tahun lalu, pengelola memutuskan tak lagi membayar sewa. Ini menjadi salah satu piutang sewa di laporan keuangan yang terus terakumulasi nilainya. "Sampai saat ini, kami tetap berkeyakinan lahan kebun binatang itu milik pemkot. Jadi pasti berkontribusi pada piutang," tutur Dadang.

Dadang mengakui status aset lahan Kebun Binatang menjadi kontroversi beberapa tahun terakhir. Ada pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan atas lahan tersebut. Namun, ditegaskan Dadang, pemkot tetap mencatat lahan tersebut sebagai aset milik. **(Tri Joko Her Riadi)*****